

KAJIAN DINAMIKA PERUBAHAN DI DALAM RUMAH TANGGA SELAMA COVID-19 DI 34 PROVINSI DI INDONESIA

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
April – Mei 2020

Executive Summary

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait Pandemi COVID-19, diantaranya kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (*social and physical distancing*), Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang khas bagi perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja.¹World Economic Forum (2020) menyatakan bahwa meskipun jumlah kematian laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dalam kasus COVID-19, namun kerentanan sosial dan ekonomi perempuan lebih tinggi. Hal ini karena jumlah perempuan sebagai pekerja kesehatan lebih banyak, bertanggung jawab sebagai perawatan anak, dan mengalami beban ganda di kerja domestik saat pandemi. Sementara itu, secara konstruksi sosial budaya di Indonesia, posisi pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas kebanyakan masih berada pada laki-laki dalam beragam hal, termasuk keputusan di rumah tangga. Pemahaman agama konservatif yang masih meyakini pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan sebagai pekerjaan perempuan memperburuk perempuan di situasi pandemi ini.

Kebijakan KdR dikuatirkan akan berakibat pada hilangnya penghasilan keluarga atau semakin berkurangnya penghasilan sehingga dapat berdampak pada kecemasan dan juga pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini diperparah dengan banyaknya layanan penanganan korban yang mengurangi jenis layanan, mengubah cara mengakses layanan dan menghilangkan/memperpendek masa operasionalnya. Kebijakan BdR (belajar dari rumah) dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada orang tua terutama ibu. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Persoalan pun bertambah dengan adanya pengeluaran tambahan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas. Ketika kerja domestik tertumpuk pada perempuan dan asupan gizi terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikis perempuan sehingga mereka semakin rentan terinfeksi COVID-19. Kebijakan KdR dan BdR juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Pembatasan sosial tidak berlaku bagi PRT, mereka tetap bekerja tanpa perlindungan dari penularan COVID-19.

Berdasarkan potensi kerentanan-kerentanan yang disebutkan di atas, maka Komnas Perempuan mengadakan Kajian Singkat terkait dengan Dinamika Perubahan Rumah Tangga Selama Masa COVID-19. Kajian ini membahas beberapa hal terkait

¹Siaran Pers Komnas Perempuan: "Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan COVID" diunduh dari website www.komnasperempuan.go.id

1) Perubahan beban kerja di rumah tangga dan pengasuhan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19; 2) Kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah personal (KDRT) selama masa Pandemi COVID-19; dan 3) Pemenuhan akses layanan yang tersedia; 4) Dampak kebijakan bekerja dan belajar dari rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); dan 5) Kelompok Rentan.

Teknis pengumpulan data menggunakan survei *online* (daring) secara terbuka, yang juga memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menentukan target tertentu dan jumlah tertentu. Sebagai hasilnya, misalnya data yang diperoleh jika dilihat dari jenis kelamin dan asal domisili menjadi tidak seimbang. Selain itu, penelitian ini terbatas pada mereka yang dapat mengisi data secara *online* dan memiliki jaringan internet yang memadai. Jumlah responden survei ini adalah 2.285 orang, yang didominasi oleh perempuan berasal dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun, lulusan S1/ sederajat, dengan penghasilan 2-5 juta rupiah, menikah, memiliki anak, bekerja penuh waktu di sektor formal serta tidak mempunyai anggota keluarga rentan. Tabel 1 memperlihatkan profil responden dalam penelitian ini secara detail:

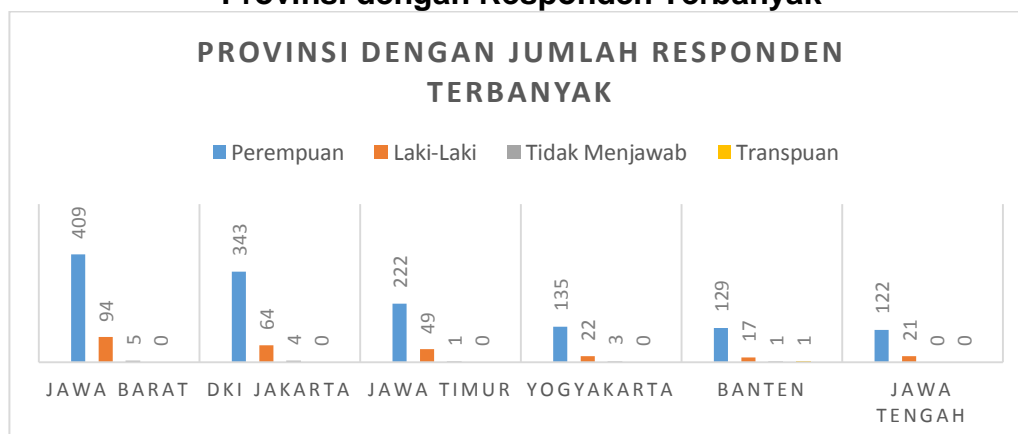
Tabel 1:
Profile Responden (N=2285)

NO	Aspek	Sub Aspek	Perempuan (N=1885)	Laki-Laki (N=379)	Tdk Jawab (N=19)	Transpuan (N=2)	Total
1	Usia	Di bawah 18 Tahun	0	0	1	0	1
		18-30 Tahun	384	60	7	1	452
		31-40 Tahun	638	113	2	1	754
		41-50 Tahun	568	129	5	0	702
		51-60 tahun	247	59	4	0	310
		Di atas 60 tahun	48	18	0	0	66
2	Pendidikan	Tidak sekolah	1	0	0	0	1
		SD/MI/Sederajat	9	2	0	0	11
		SMP/MTs/Sederajat	30	1	1	0	32
		SMA/SMK/MA/Sederajat	273	34	2	0	309
		D3/Sederajat	133	20	3	0	156
		D4/S1/Sederajat	874	177	6	2	1059
		Pasca sarjana	565	145	7	0	717
3	Penghasilan	Tidak Menjawab	343	19	1	0	363
		Kurang dari 2 Juta Rupiah	347	41	4	0	392
		2 – 5 Juta Rupiah	519	122	4	1	646
		5 – 10 Juta Rupiah	384	99	3	1	487
		Lebih dari 10 Juta Rupiah	292	98	7	0	397
4	Status Perkawinan	Menikah	1546	331	12	1	1890
		Tidak Menikah	339	48	7	1	395
5	Status Pekerjaan	Paruh Waktu	534	94	7	1	636
		Penuh Waktu	1009	259	11	1	1280
		Tidak Menjawab	342	26	1	0	369
6	SektorPekerjaan	Formal	1098	274	11	1	1384
		Informal	450	84	7	1	542
		Tidak Menjawab	337	21	1	0	359

7	Urus RT	Tidak	204	62	3	0	269
		Ya	1656	313	15	2	1986
		Tidak Menjawab	25	4	1	0	30
8	Memiliki Anak	Tidak	373	70	6	1	450
		Ya	1512	309	13	1	1835
9	Jumlah Anak	1 - 2 orang	981	183	8	1	1173
		3 - 5 orang	656	161	6	1	824
		Lebih dari 5 orang	116	14	2	0	132
		Tidak Relevan	132	21	3	0	156
10	Keluarga Rentan	Tidak	1278	282	12	2	1574
		Ya	607	97	7	0	711

Survei daring ini berhasil mengumpulkan responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Walaupun semua Provinsi terwakili, sebagian besar responden masih berasal dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten dan Jawa Tengah, dengan peringkat tertinggi berasal dari Jawa Barat. Tabel 2 menginformasikan enam provinsi dengan jumlah responden dari wilayah-wilayah dengan persebaran kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, hasil Analisa survei kemungkinan tidak mewakili keadaan di luar Jawa, terutama di daerah timur Indonesia.

Tabel 2
Provinsi dengan Responden Terbanyak



Hasil survei secara signifikan memperlihatkan adanya beberapa temuan, sebagai berikut:

1. Perubahan Beban Kerja Rumah Tangga dan Pengasuhan Selama Masa Pandemi COVID-19

- Mayoritas responden mengaku mengurus rumah tangga (Perempuan 88%; Laki-Laki 83%), dimana 66% melaporkan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga lebih dari 3 jam jumlahnya hampir empat kali lipat dari pada laki-laki, transpuan dan responden yang memilih untuk tidak mengidentifikasikan jenis kelaminnya. Terdapat 1 dari 3 responden yang melaporkan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga membuat dirinya mengalami stress.
- 70% responden perempuan menjawab bahwa pekerjaan rumah tangga, terutama memasak dan mencuci pakaian, bertambah secara signifikan sejak

COVID-19. Sementara hanya sekitar 49% responden laki-laki menjawab pekerjaan rumah tangga mereka bertambah. Hasil ini menyiratkan bahwa beban pekerjaan rumah tangga selama COVID-19 secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki.

- Kebanyakan responden (57%) melaporkan bahwa anaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ada sekitar 22% responden menyatakan bahwa anak laki-laki maupun perempuan membantu pekerjaan rumah tangga. Jumlah anak tidak mempengaruhi tingkat stress selama COVID-19, namun semakin banyak anak maka pengeluaran semakin bertambah. Hampir 75% responden yang memiliki anak lebih dari 3 orang menyatakan pengeluaran rumah tangga semakin bertambah.
- Mayoritas (72%) responden melaporkan bahwa pengeluaran semakin bertambah di masa pandemi COVID-19, dan hanya 1% yang melaporkan penghasilan bertambah. Beban pengeluaran ini juga bertambah dengan adanya biaya tambahan untuk kuota internet selama belajar dan kerja dari rumah, juga sarana teknologi lainnya seperti laptop atau *mobile phone* yang memadai untuk kebutuhan kerja dan belajar online. Masalah lainnya adalah harga kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan di pasaran, yang mendorong pengeluaran meningkat dari biasanya.
- Ada sekitar 40% responden menyatakan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaannya. Hal serupa juga dialami para pelajar/mahasiswa-i yang sedang belajar dan kuliah, lebih kurang 30% dari pelajar juga menyatakan khawatir hingga sangat khawatir dalam mendapatkan akses belajar yang optimal.

2. Kekerasan dalam Ranah Personal (KDRT) Selama Masa Pandemi COVID-19

- Sejak pandemi COVID-19, 1 dari 3 responden melaporkan bahwa hubungan dengan pasangan semakin harmonis dan hampir 40% responden melaporkan bahwa mereka tidak mengalami perubahan apapun. Ada sekitar 10.3% (236) responden melaporkan bahwa hubungan mereka dengan pasangannya semakin tegang, dimana mereka yang mempunyai status menikah lebih rentan (12%) daripada yang yang tidak menikah (2.5%).
- Jika dilihat berdasarkan usia responden, usia 31-40 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjawab bahwa hubungan dengan pasangan menjadi lebih tegang sejak pandemi COVID-19. Lebih jauh lagi, jika dicermati berdasarkan penghasilan responden, terdapat hampir 2 kali lebih banyak jumlah responden dengan penghasilan di bawah 5 Juta Rupiah yang menyatakan bahwa hubungan dengan pasangan semakin tegang sejak pandemi COVID-19, dibandingkan kelompok responden yang memiliki penghasilan di atas 5 Juta Rupiah, yaitu sebanyak 122 orang. Hal ini bisa jadi mengindikasikan asosiasi antara kelas sosial ekonomi tertentu dengan tingkat keharmonisan rumah tangga selama COVID-19.
- Berdasarkan jenisnya, perempuan lebih banyak mengalami semua jenis kekerasan dibandingkan laki-laki. Selama pandemi COVID-19 secara umum kekerasan psikologis dan ekonomi lebih umum dialami oleh responden daripada jenis kekerasan lainnya. Untuk kekerasan psikologis, 15%, atau 289 perempuan, menjawab kadang-kadang mengalami, dan 4%, atau 66 perempuan, menjawab sering mengalami. Sementara, untuk kekerasan yang sama hanya 11% atau 41 laki-laki, yang menjawab kadang-kadang mengalami dan hanya 2 orang menjawab sering. Untuk kekerasan ekonomi,

7% dari responden perempuan menjawab kadang-kadang, atau setara dengan 135 orang, dan 3% menjawab sering, atau setara dengan 472 orang. Sedangkan prosentase laki-laki yang menjawab kadang-kadang kurang dari 5%, atau setara dengan 14 orang, dan yang menjawab sering adalah 4 orang, dari total 379 responden laki-laki.

- Jenis kekerasan terhadap anggota keluarga lain mengikuti pola jenis kekerasan terhadap diri sendiri, di mana kekerasan psikologis dan ekonomi terlihat lebih sering terjadi dibandingkan kekerasan fisik dan seksual. Sebanyak 15% atau 292 responden perempuan, dan 12% atau 46 responden laki-laki menyebutkan bahwa terjadi kekerasan psikologis terhadap anggota keluarga lain di rumah, baik kadang-kadang maupun sering. Sementara 5%, atau 102 responden perempuan, dan 5% atau 19 responden laki-laki, menjawab bahwa terjadi kekerasan ekonomi terhadap anggota keluarga lain di rumah, baik kadang-kadang maupun sering.
- Anak teridentifikasi sebagai anggota keluarga di rumah yang paling banyak mengalami kekerasan, diikuti oleh pasangan dan ibu/mertua perempuan. Pasangan teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap anggota keluarga lain. Kombinasi pasangan dan anak dipilih responden sebagai pelaku kekerasan berikutnya, diikuti ibu/mertua perempuan untuk kekerasan terhadap diri sendiri. Sementara, ayah/mertua laki-laki disebutkan sebagai pelaku kekerasan terhadap orang lain paling banyak setelah pasangan.
- Selama COVID-19, frekuensi kekerasan semakin sering terjadi pada perempuan (8%; 144 orang), dari pada laki-laki (4%; 16 orang), pada responden yang menikah, dan berada di rentang usia 31- 40 tahun serta penghasilan di bawah 5 Juta Rupiah. Sebanyak 179 responden perempuan menjawab bahwa selama COVID-19 frekuensi kekerasan yang dialami anggota keluarga lain semakin sering terjadi.
- Di kelompok pekerja sektor formal, 6% responden menjawab kekerasan lebih sering terjadi selama COVID-19, sedangkan di antara kelompok pekerja sector informal jumlahnya sebesar 11%. Jumlah tersebut adalah responden yang memiliki penghasilan di bawah 5 Juta Rupiah, di mana 44% adalah pekerja sektor formal dan 75% adalah pekerja sektor informal. Jika dikaitkan dengan kelompok penghasilan yang lebih rentan mengalami kekerasan, maka pekerja informal memiliki kerentanan yang lebih tinggi.
- Sejak masa pandemi COVID-19, kekerasan semakin sering terjadi pada kelompok dengan pengeluaran bertambah dan pada keluarga yang punya penghasilan kurang dari 5 Juta Rupiah. Sebagai catatan, 85% dari yang menjawab kekerasan semakin sering terjadi adalah responden dengan pengeluaran bertambah selama COVID-19. Hasil ini memperkuat asumsi bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya kekerasan.
- Sebanyak 100% responden yang menjawab lebih sering mengalami kekerasan fisik dan seksual, dan lebih dari 75% responden yang menjawab lebih sering mengalami kekerasan psikologis dan ekonomi selama COVID-19, juga menjawab pengeluaran bertambah selama pandemi.

3. Pemenuhan Akses Layanan

- Secara keseluruhan, baik responden yang mengalami kekerasan atau tidak, sekitar 14% responden atau 316 orang menjawab diam saja atau tidak melakukan apa-apa jika mengalami kekerasan baik dalam bentuk kekerasan

fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Sementara, 13% atau 296 responden memilih memberitahu saudara, teman atau tetangga terdekat. Sebanyak 10% atau 223 responden memilih melapor ke lembaga yang menyediakan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Namun Jika dilihat dari korban yang melaporkan semakin sering mengalami kekerasan saat COVID-19, ada sekitar 88% perempuan, 10% laki-laki, Jenis Kelamin lain/tidak menjawab 2% dan dari mereka ada sekitar 80.3 % yang tidak melapor ke lembaga layanan.

- Sikap diam saja atau memberitahukan kepada saudara, teman dan/atau tetangga juga ternyata merupakan pilihan perempuan yang berstatus menikah dan tidak menikah, dengan status menikah lebih tinggi persentasenya, sebesar kurang lebih 14%. Hal yang menarik adalah sikap tersebut didominasi oleh responden dengan latar belakang pendidikan minimal S1 hingga pasca sarjana, dan jika dijumlah keseluruhan mencapai 78% untuk diam saja, dan 77% menjawab hanya memberitahu kerabat terdekat.
- Hal ini menguatkan asumsi bahwa angka kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es, di mana data dan angka yang ada yang tersedia hanyalah data-data yang dilaporkan. Pilihan-pilihan jawaban responden ini bisa jadi meningkat seiring dengan diberlakukannya PSBB di mana intensitas korban bersama-sama dengan pelaku kekerasan di dalam rumah juga meningkat yang bisa berakibat korban takut melapor. Sementara, pilihan jawaban tidak relevan memiliki jumlah tinggi sekitar 35% atau 814 responden karena jumlah responden yang mengisi survei menyatakan tidak mengalami kekerasan selama Kebijakan KdR dan PSBB diberlakukan.
- Sebanyak 68,8% atau 1,573 responden tidak menyimpan kontak layanan pengaduan. Data ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan belum memiliki kesadaran yang cukup dalam hal manajemen resiko kekerasan.
- Secara keseluruhan ada 172 responden (136 orang diantaranya perempuan) yang menjawab mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pengaduan. Dalam pertanyaan terbuka ditemukan bahwa kesulitan mengakses layanan ini karena masalah literasi teknologi. Sarana dan prasarana teknologi seperti *mobile phone* atau komputer laptop/desktop serta kapasitas penguasaan teknologi yang ada dan tersedia, tidak memadai, termasuk pengadaan kuota dan jaringan internet yang stabil. Situasi ini perlu menjadi perhatian dalam situasi pandemi ini. Kesulitan mengakses layanan ini pun dialami oleh kelompok responden yang terdampak pengeluaran bertambah selama masa pandemi, yaitu mencapai 8% atau 138 orang responden.

4. Dampak Kebijakan Kerja dari Rumah (KdR), Belajar dari Rumah (BdR), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

- Sekitar 83% responden memilih bahwa kebijakan Bekerja dan Belajar dari Rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat menguntungkan dan merugikan. Mereka yang hanya menjawab menguntungkan sekitar 9% sedangkan yang merugikan sekitar 6%. Lainnya 2% tidak menjawab. Terdapat 8% responden laki-laki dan 86% responden perempuan yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut.

- Kelompok dengan rentang usia 31 – 40 tahun dan berpenghasilan kurang dari 2 Juta Rupiah menyatakan hal yang sama bahwa kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah cenderung merugikan mereka.
- Kelompok yang berpenghasilan di atas 5 Juta Rupiah cenderung menganggap bahwa kebijakan bekerja dan belajar dari rumah menguntungkan, sedangkan kelompok yang berpenghasilan di bawah 5 Juta Rupiah memiliki kecenderungan untuk menganggap kebijakan tersebut merugikan.
- Responden dalam pertanyaan terbuka menyatakan bahwa kebijakan PSBB belum optimal dan pemerintah masih belum tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Selain ketegasan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah serta sanksi bagi yang melanggar, responden lebih jauh lagi menginginkan bantuan ekonomi bagi kelompok yang tidak mampu agar didistribusikan secara merata dengan pendataan yang jelas dan anggaran yang transparan.
- Kebijakan lainnya yang penting menjadi perhatian pemerintah adalah kebijakan terkait teknologi dan informasi serta pendidikan yang ramah terhadap anak selama masa pandemi COVID-19. Misalnya, waktu belajar dengan pekerjaan rumah yang tidak terlalu banyak tapi efektif dan efisien; akses belajar yang optimal berupa panduan teknologi, subsidi kuota dan jaringan internet yang memadai, serta faktor kesehatan mata anak yang perlu diperhatikan karena anak seringkali berkutat di depan monitor laptop atau desktop. Kebijakan lainnya yang menjadi perhatian adalah kebijakan kesehatan mental baik bagi mereka yang belajar maupun bekerja di rumah. Khusus untuk responden perempuan, terdapat rekomendasi spesifik terkait kebutuhan rumah aman dan kemudahan dalam mengakses layanan kekerasan.

5. Kelompok Rentan

Dari keseluruhan 2,285 responden, 70% melaporkan tidak ada anggota keluarga rentan (misalnya, orang lanjut usia, orang dengan disabilitas, dll) di rumah mereka, sementara 30% sisanya menyatakan ada. Terdapat beberapa temuan penting terkait anggota keluarga rentan dilihat dari aspek penghasilan, pengeluaran, kekerasan dan dampak kebijakan, yaitu:

- Tidak ada kecenderungan sebaran anggota keluarga rentan di keluarga berpenghasilan tertentu.
- Keluarga yang mempunyai kelompok rentan cenderung mengalami kekerasan yang lebih sering daripada keluarga yang tidak mempunyai anggota rentan. Responden yang mempunyai anggota keluarga rentan mengalami kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi hampir dua kali lipat dari responden yang tidak mempunyai kelompok rentan selama pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari prosentasi pengeluaran responden yang bertambah dan penghasilan yang berkurang pada keluarga yang memiliki anggota yang rentan.

Kesimpulan

1. Masa pandemi COVID-19 mendorong adanya perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan, pengeluaran cenderung bertambah dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan mengakses belajar yang optimal meningkat.
2. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender yang disematkan padanya, terutama karena masih adanya keyakinan bahwa kerja domestik menjadi tanggungjawab terbesar dan utama yang dibebankan pada perempuan.
3. Jumlah perempuan yang mengalami penambahan waktu kerja domestik lebih dari 3 jam selama COVID-19 empat kali lebih banyak dibandingkan laki-laki, transpuan dan responden yang tidak mengidentifikasi identitasnya. Hal ini kemungkinan besar karena adanya tugas tambahan untuk memasak dan mendampingi anak belajar di rumah, yang biasanya dilakukan di sekolah.
4. Kebijakan *Stay at Home* memaksa perempuan untuk mempelajari teknologi belajar secara online untuk anaknya. Pandemi COVID-19 juga membuat Ibu kehilangan *support system*, misalnya pekerja rumah tangga, mertua, atau anggota keluarga dekat lainnya, untuk membantu dirinya memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga telah berujung pada naiknya tingkat stress.
5. Kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi di masa pandemi COVID-19 dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kelompok perempuan, kelompok usia rentang 31 - 40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok berpenghasilan kurang dari 5 Juta Rupiah, dan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
6. Pasangan disebutkan sebagai pelaku kekerasan paling tinggi pada kekerasan terhadap diri sendiri dan kekerasan terhadap anggota keluarga lain. Sementara anak teridentifikasi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang semakin sering terjadi kekerasan, terutama kekerasan fisik dan seksual, yang mengindikasikan persoalan ekonomi berpeluang dalam mendorong terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga
8. Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya di masa pandemi COVID-19 karena sikap diam saja atau memberitahukan kepada saudara, teman dan/atau tetangga yang menjadi pilihan perempuan, baik yang berstatus menikah maupun tidak menikah, ataupun oleh responden dengan latar belakang Pendidikan minimal S1 hingga pasca sarjana. Hal lainnya adalah masih rendahnya kesadaran publik untuk menyimpan kontak layanan pengaduan.
9. Literasi teknologi dan masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini saling berkelindan menjadi faktor pendorong dalam mengakses layanan pengaduan, masalah kerja dan belajar dari rumah. Jaringan internet yang tidak stabil, anggaran untuk kuota internet dan bagaimana menggunakan teknologi yang ada kerap menjadi permasalahan yang muncul selama masa pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia masih belum siap dengan teknologi daring dan infrastruktur teknologi belum tersedia secara merata, termasuk keamanan datanya, di 34 provinsi di Indonesia.

Rekomendasi

Hasil dari survei daring pada perubahan dinamika rumah tangga di masa Covid-19 menunjukkan bahwa kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan, kelompok usia rentang 31- 40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok penghasilan kurang dari 5 Juta Rupiah, dan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Memastikan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, termasuk penerapan Kebijakan Normal Baru, mencakup pertimbangan dan terobosan penyikapan yang lebih komprehensif terhadap kerentanan-kerentanan yang dihadapi kelompok dalam masyarakat, khususnya perempuan. Selain aspek kesehatan, kebijakan-kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan ekonomi, teknologi dan informasi, kesehatan mental, dan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
2. Dengan mempertimbangkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak, karena secara konstruksi budaya rumah tangga menjadi tugas domestik perempuan, maka perlu mengintensifkan program yang merubah pemikiran konservatif dan misoginis ke arah pemikiran progresif dan egaliter. Selain itu juga diperlukan skema dukungan khusus bagi perempuan. Bantuan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah perlu mencakup bantuan kebutuhan pokok, sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kerja yang kreatif yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus kehilangan pekerjaan, terutama yang bekerja di sektor informal. Bantuan ekonomi ini pun perlu teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik dan transparan, sehingga perempuan kepala keluarga, para pekerja di sektor informal, kelompok berpenghasilan kurang dari 5 Juta Rupiah, dapat menjadi bagian target langkah afirmasi dalam pemberian daftar penerima bantuan ekonomi.
3. Pemerintah perlu segera mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup kepada masyarakat serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi terhadap teknologi dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini mencakup jaringan internet, keamanan data di sosial media, komputer laptop/desktop/mobile phone yang memadai serta harga kuota internet yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemerintah memastikan penyelenggaraan layanan tersedia dan mudah diakses bagi korban kekerasan yang akan mengadukan kasusnya. Perhatian juga harus diberikan pada ketersediaan teknologi dan informasi, dana dan akses pengaduan yang ramah dan aman selama masa pandemi COVID-19 ini.
5. Penyebarluasan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hak-hak perempuan korban kekerasan, khususnya dalam konteks KDRT, perlu diperluas dan diperbanyak. Media massa pemerintah seperti RRI dan TVRI nasional maupun daerah dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi layanan pengaduan

terstruktur yang disediakan pemerintah di seluruh tanah air dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas.

Penutup

Komnas Perempuan berterima kasih kepada semua responden yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengisi survei ini dan menjadi bagian penting untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada program MAMPU yang telah memberikan dukungan untuk penelitian ini.

Tim Peneliti, Analisa Data dan Diskusi: Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Dwi Ayu Kartika, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Marisna Yulianti, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Nurwati Hodijah, Theresia Sri Endras Iswarini

Tim Penulis: Alimatul Qibtiyah, Retty Ratnawati, Siti Nurwati Hodijah, Dwi Ayu Kartika, Marisna Yulianti

@ Komnas Perempuan, Jakarta
6 Juli 2020